Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam Penanganan
Perempuan Korban Pelecehan Seksual
Natha Naila Nareswari, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Natha Naila Nareswari[1], Niken Subekti Budi Utami[2]

INTISARI

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyelenggaraan layanan yang dihadapi oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan perempuan korban pelecehan seksual serta upaya yang seharusnya dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan dalam penanganan perempuan korban pelecehan seksual.

Penulisan Hukum ini berjenis penelitian normatif-empiris, data sekunder diperoleh melalui hasil studi pustaka, data primer diperoleh hasil studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Data-data yang didapatkan kemudian disusun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan melalui metode deduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menujukkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, hambatan yang dialami oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan perempuan korban pelecehan seksual menunjukan bahwa masih terdapat kekosongan peraturan pelaksana, berkurangnya anggaran operasional UPT PPA Kota Yogyakarta, lemahnya komitmen korban, sikap dan respons masyarakat terhadap korban pelecehan seksual, dan sikap aparat penegak hukum selama proses peradilan yang tidak berperspektif korban. Kedua, upaya yang seyogyanya dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan perempuan korban pelecehan seksual meliputi penyempurnaan regulasi dan standar operasional prosedur layanan, mendorong perhatian pemerintah terhadap urgensi penanganan perempuan korban pelecehan seksual, penguatan kapabilitas Satgas SIGRAK dalam penjangkauan dan penanganan awal, penguatan sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, dan penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perempuan korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, UPTD PPA, Korban Perempuan

---

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perempuan Korban Pelecehan Seksual
Natha Naila Nareswari, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE ROLE OF TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT FOR WOMEN'S AND CHILDREN'S PROTECTION OF YOGYAKARTA CITY (UPT PPA KOTA YOGYAKARTA) *IN HANDLING WOMEN VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT*

Natha Naila Nareswari[1], Niken Subekti Budi Utami[2]

ABSTRACT

This research focuses on identifying and analyzing obstacles in service provision faced by UPT PPA Kota Yogyakarta *in handling women victim of sexual harassment, as well as the efforts that should be taken by* UPT PPA Kota Yogyakarta *to improve its service in handling women victim of sexual harassment.*

This legal research is normative-empirical research, with data collected through library research and field studies conducted by interviews with respondents and source person. The collected data were subsequently compiled and analyzed using descriptive qualitative methods, and conclusions were drawn through a deductive approach.

Based on the research results, this research shows two conclusions. First, the obstacles experienced by UPT PPA Kota Yogyakarta in handling women victims of sexual harassment include the continued absence of implementing regulations, reduced operational budget for UPT PPA Kota Yogyakarta, weak commitment from victims, the attitude and response of society toward victims of sexual harassment, and the attitude of law enforcement officers during the judicial process that lacks a victim-oriented perspective. Second, the efforts that should be undertaken by UPT PPA Kota Yogyakarta in handling women victims of sexual harassment include improving regulations and standard operating procedures for services, encouraging government attention to the urgency of handling women victims of sexual harassment, strengthening the capability of the Satgas SIGRAK in outreach and initial handling, strengthening synergy with the Yogyakarta City Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, and strengthening synergy with law enforcement officers directly involved in handling women victims of sexual harassment.

Keywords: *Sexual Harassment,* UPTD PPA, *Women Victims.*

[1] Undergraduate Student of Criminal Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Lecturer of Criminal Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.